

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

PERKEMBANGAN INFLASI

- Angka **inflasi tahunan** Provinsi Papua Barat Daya pada **triwulan IV** (Oct – Des) berturut-turut sebesar **2,00 %, 2,33 % dan 1,87 % (yoy)**.
- Untuk angka **inflasi bulanan** Provinsi Papua Barat Daya pada **triwulan IV** (Oct – Des) berturut-turut sebesar **-0,15%, -0,04 % dan -0,11 % (mtm)**.
- **Penyumbang utama deflasi Desember 2024** secara **m-to-m** di Provinsi Papua Barat Daya adalah kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil 0,14%. **Komoditas penyumbang utama deflasi antara lain Bawang Merah, Tomat, dan Ikan Kuwe/Bubara.**
- **Penyumbang utama inflasi Desember 2024** secara **y-on-y** di Provinsi Papua Barat Daya adalah kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Dimana memiliki andil 1,37%, **dengan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah Ikan Tuna, Beras, dan Sigaret Kretek Mesin.**

PERKEMBANGAN HARGA BAPOKTING

- Harga Beras Medium rata-rata pada triwulan IV sebesar Rp. 15.750/kg. Harga tersebut **tidak mengalami perubahan** dari harga rata-rata pada periode triwulan sebelumnya.
- Komoditas yang mengalami persentase kenaikan harga terbesar adalah **Tomat**, yakni mengalami kenaikan sebesar 76,78% dari harga Rp. 12.940/kg menjadi Rp. 22.875/kg pada triwulan IV.
- Lima komoditas yang mengalami fluktuasi harga selama periode IV 2024 lebih lengkapnya tersaji pada tabel di bawah:

Komoditas	TWIII	TWIV	Keterangan	Persentase Perubahan
Tomat	12940	22875	Naik	76,78%
Bawang Merah	39921	50583	Naik	26,71%
Bawang Putih Honan	51012	54375	Naik	6,59%
Ikan Kembung	44127	46667	Naik	5,76%
Cabai Rawit Merah	65476	69083	Naik	5,51%

RESIKO KE DEPAN

Fluktuasi harga pertanian khususnya tanaman sayuran akan tetap terjadi pada tahun 2025 dikarenakan kondisi jumlah petani di Provinsi Papua Barat Daya yang berkurang dan masih belum sepenuhnya lahan pertanian yang dikelolah sehingga menyebabkan ketergantungan pasokan tersebut dari wilayah Maluku, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Permasalahan fluktuasi harga pangan yang terjadi sepanjang periode triwulan IV yakni fluktuasi tanaman sayuran. Hal tersebut terjadi dikarenakan berkurangnya jumlah petani produktif sehingga memperlambat proses optimalisasi lahan pertanian di Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam menjaga inflasi agar terkendali, maka diperlukan beberapa kebijakan terkait gerakan menanam dengan pemberian lahan pertanian dan akses permodalan kepada petani serta dukungan penyerapan hasil panen agar menarik minat petani muda untuk bertani.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pengendalian inflasi, maka direkomendasikan beberapa kegiatan seperti:

1. Optimalisasi lahan pertanian
2. Pembukaan dan pemanfaatan lahan-lahan tidur
3. Bantuan permodalan bagi Petani Muda dalam bertani atau pengembangan petani millenial

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan kebijakan pengendalian inflasi pada triwulan IV yang telah terlaksana, maka perlu dilakukan evaluasi pasca kegiatan agar dapat mengukur ketepatan dan keberhasilan suatu kegiatan. Adapun hasil evaluasinya adalah sebagai berikut:

1. Perlunya menetapkan upaya pengendalian inflasi terkait supply barang pangan berdasarkan Neraca Pangan Wilayah yang sedang dan telah tersusun
2. Perlunya membuka lahan-lahan pertanian baru dengan pemanfaatan lahan tidur di tiap kab/kota

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan evaluasi kebijakan pengendalian inflasi pada triwulan IV tersebut, maka diberikan rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Mendorong kab/kota untuk segera menetapkan langkah-langkah pengendalian inflasi mengacu Neraca Pangan Wilayah;
2. Mendorong kab/kota memetakan potensi lahan pertanian baru dan mendorong program petani millenial.